

BAB II

SLTP TERBUKA DAN PROGRAM WAJIB BELAJAR

A. SLTP TERBUKA

Sesuatu yang baru, pada umumnya belum dikenal oleh masyarakat luas. Begitu pula halnya dalam pembaharuan pendidikan. Masyarakat yang belum mengenal pembaharuan itu, pada umumnya akan membandingkannya dengan sistem yang lama, yang sudah biasa mereka ketahui dan mengenalnya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula halnya dengan SLTP terbuka sebagai sub sistem pendidikan Sekolah Lanjutan - Tingkat Pertama (SLTP) yang berdasarkan prinsip-prinsip belajar mandiri. Maka disini akan penulis paparkan beberapa hal yang berhubungan dengan SLTP Terbuka.

1. Pengertian SLTP Terbuka

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka atau - SLTP Terbuka adalah suatu sub sistem pendidikan jalur sekolah lanjutan tingkat pertama yang menggunakan kurikulum yang sama seperti SLTP biasa, tetapi menggunakan pola kegiatan belajar mengajar yang berbeda.¹⁾

SLTP Terbuka juga suatu sub sistem pendidikan SLTP yang pengajarannya sebagian besar melalui media cetak (modul dan bresur), media audio dan audio visual²⁾

1) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Pengenal-an SMP Terbuka, Depdikbud Kantor Wilayah Jawa Timur Hal.7

2) Depdikbud, SLTP Terbuka, suatu pola penuntasan-wajar 9 tahun, Surabaya 1995/1996

Sistem pendidikan ini dikatakan terbuka karena

1. Sistem ini memberi kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak yang ingin belajar tetapi tidak dapat memasuki sekolah konvensional disebabkan karena faktor waktu, geografis, sosial ekonomi, dan sebagainya.
2. Sistem ini tidak secara ketat terikat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pendidikan yang bersifat konvensional. Pada sistem ini siswa tidak diwajibkan untuk hadir di sekolah dan mengikuti pelajaran di kelas setiap hari sesuai dengan jadwal yang berlaku secara kaku. Jadwal dan tempat belajar dapat diatur oleh siswa sendiri atau oleh siswa bersama guru pembimbing.³⁾

Pertemuan antara siswa dan guru pembina di sekolah induk dapat dilakukan secara berkala, sedangkan kegiatan belajar sehari-hari sebagian besar dilakukan diluar gedung SMP, misalnya di balai desa, rumah penduduk atau dirumah siswa.

2. Tujuan Dan Sasaran SLTP Terbuka

Pendidikan Nasional, pada hakekatnya, bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia berpancasila yakni manusia yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dirinya dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya,

³⁾ Depdikbud, Op.Git. Hal. 8

manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat ba-
bangsanya, dan manusia dengan lingkungan alamnya.

Dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional
diatas, maka misi SLTP Terbuka adalah menunjang usaha
pemerintah dalam mensukseskan tujuan pendidikan nasio-
nal berdasarkan Pancasila, yaitu meningkatkan kualitas
manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan ber-
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, ber-
kepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, ber-
tanggungjawab, mandiri, cerdas dan terampil serta se-
hat jasmani dan rohani agar dapat menjadi manusia-manu-
sia pembangunan. 4)

SLTP Terbuka juga bertujuan memperluas kesempat-
tan belajar bagi mereka yang belum terjangkau oleh
sistem pendidikan yang konvensional karena alasan eke-
nomi, geografis, maupun kesempatan. 5) Melalui sistem
ini, anak-anak yang dulunya karena kesibukan kerja ti-
dak dapat mengikuti pendidikan SLTP kegiatan belajar -
nya tidak terganggu. Begitu pula halnya mereka yang
tinggal di daerah-daerah terpencil yang belum memiliki
SLTP.

Dengan belajar di SLTP Terbuka mereka dapat me-
penuhi hasrat belajarnya tanpa meninggalkan tempat me-
mereka tinggal.

4) i b i d

5) Depdikbud, Pemasyarakatan SMP Terbuka, Depdikbud
I Jatim, Hal. 3.

SLTP Terbuka sebagaimana SLTP biasa juga memiliki tujuan institusional. Tujuan Institusional dimaksudkan adalah rumusan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang diharapkan dimiliki siswa setelah menyelesaikan program pendidikan pada suatu jenjang sekolah tertentu, atau dengan kata lain, tujuan Institusional adalah gambaran lulusan yang diharapkan oleh masing-masing jenjang pendidikan sekolah atau madrasah.⁶⁾

Tujuan institusional suatu jenis pendidikan sekolah harus didasarkan pada fungsi sosial satuan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Seperti jenis pendidikan umum, pada dasarnya mempunyai tiga fungsi sosial, yaitu:

- a. fungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila
- b. fungsi untuk membekali peserta didik yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya dengan kemampuan ketrampilan fungsional
- c. fungsi untuk membekali peserta didik untuk dapat melanjutkan pelajarannya.⁷⁾

Tiga fungsi sosial diatas dapat melahirkan tiga gugus tujuan institusional, yakni tujuan pendidikan kewarganegaraan, ketrampilan dan kemampuan akademik.

⁶⁾ A. Hamid Syarif, Pengenalan Kurikulum Sekolah & Madrasah, Citra Umbara, Banaung, 1995, Hal.5

⁷⁾ i b i d

Sedangkan tujuan instruksional SLTP Terbuka sama dengan tujuan pada SLTP biasa. Yang berupa tujuan pelajaran untuk kelas I, II dan III yang masing-masing dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan yang lebih rinci seperti yang tercantum dalam buku GBPP kurikulum SLTP.

Selain beberapa tujuan diatas, SLTP Terbuka sebagai sub sistem pendidikan SLTP, berfungsi juga memperluas pelayanan dan membantu usaha pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi lulusan SD dan yang sederajat.

SLTP Terbuka sebagai sesuatu yang baru dalam masyarakat, maka perlu adanya pendekatan husus agar bisa diterima dan masyarakat dapat berpartisipasi didalamnya.

Sasaran kegiatan pemasyarakatan suatu ide yang baru biasanya dapat ditunjukan kepada:

a. Individu atau pererangan.

Yaitu anggota masyarakat yang terkecil atau seseorang yang mempunyai pengaruh agar dapat mempengaruhi orang-orang dibawahnya untuk menerima pembaharuan tersebut

b. Kelempok

yaitu sekumpulan orang yang bergabung dalam suatu kegiatan tertentu karena ikatan pribadi, sosial, budaya dan lain-lain.

Kelempok yang bisa dijadikan sasaran pemasyarakatan, misalnya kelempok pengajian, pemuda, kesenian dan semacamnya.

c. Organisasi

Organisasi ini mirip kelempok, hanya bila kelempok biasanya bukan merupakan organisasi formal. Maka dalam organisasi jelas siapa yang menjadi ketua, sekretaris dan sebagainya.⁸⁾

Dengan sasaran kemasyarakatan ini diharapkan apa yang menjadi tujuan didirikannya SLTP Terbuka dapat tercapai secara maksimal untuk selanjutnya tercapai pula tujuan pendidikan nasional.

3. Kurikulum SLTP Terbuka

Dikalangan para ahli kurikulum, terdapat perbedaan mengenai definisi kurikulum. Perbedaan tersebut disebabkan adanya sudut pandang yang berlainan dalam memberikan batasan kurikulum diantara para ahli tersebut.

Dari beberapa definisi yang berbeda tersebut akan kami ambil satu definisi yaitu sejumlah program belajar siswa yang disusun secara legis dan sistematis dibawah tanggungjawab sekolah atau guru, guna mencapai tujuan pendidikan sekolah yang ditetapkan.⁹⁾

8) Pemasyarakatan SMP Terbuka, Op.Cit, hal.8-9
9) A.Hamid Syarif, Op.Cit., Hal.2

Pengertian diatas bersifat operasional, artinya terdiri atas seperangkat program belajar siswa atau program pendidikan yang diprogramkan di sekolah, agar dapat menderong perkembangan siswa secara optimal. Program-program tersebut dapat berupa kegiatan intra kurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan ekstra kurikuler atau program yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas bagi siswa.

Betapapun beragamnya batasan kurikuler diatas, namun pada prinsipnya harus mampu menjawab persoalan yakni 1. Apa tujuan yang ingin dicapai, 2. pengalaman belajar apakah yang perlu disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut, 3. Bagaimana menyatakan keberhasilan pencapaian tujuan itu. Keempat pernyataan ini, sebenarnya berhubungan dengan arah dan tujuan pendidikan, isi atau bahan kurikulum, dan evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum tersebut.

Kurikulum yang digunakan di SLTP Terbuka adalah kurikulum (GBPP) SLTP yang berlaku. Kurikulum tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pola dasar kegiatan belajar mengajar (PDKBM). Isi PDKBM ini sama dengan isi GBPP SMP. Bedanya ialah bahwa PDKM itu mengandung tujuan instruksional khusus dan rincian pokok-pokok isi pelajaran yg dijabarkan lebih lanjut dari isi GBPP.¹⁰⁾

¹⁰⁾ Pengenalan SLTP Terbuka, Op.Cit., Hal.10

Karena kurikulum yang digunakan oleh SLTP biasa saat ini adalah kurikulum 1994, maka SLTP Terbuka juga menggunakan kurikulum 1994. Kurikulum 1994 yang saat - berlakunya dilaksanakan secara bertahap, mulai tahun ajaran 1994/1995, merupakan pembenahan dari pelaksanaan kurikulum 1984. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa saat sekarang dan masa depan terdapat sejumlah tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pembangunan berkembang pesatnya arus informasi dan globalisasi, se serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum 1984 itu sendiri.

Pada kurikulum 1994 ini antara Sekolah Dasar atau SD dan SLTP tidak dibedakan. Karena telah disesuaikan dengan Program pendidikan Dasar 9 tahun.

Kurikulum pendidikan dasar disusun untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Kurikulum pendidikan dasar merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD dan SLTP.

Isi kurikulum pendidikan dasar wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian pelajaran tentang pendidikan Pancasila, Agama, Kewarganegaraan, bahasa Indonesia, pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, Seja-

rah, Nasional, sejarah umum, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan, menggambar, serta bahasa Inggris.

Sebutan-sebutan diatas bukan nama mata pelajaran, melainkan sebutan yang mengacu pada pembentukan kepribadian dan unsur-unsur kemampuan yang diajarkan dan dikembangkan melalui pendidikan dasar. Lebih dari satu unsur tersebut dapat digabung dalam satu mata pelajaran atau sebaliknya, satu unsur dapat dibagi lebih dari satu mata pelajaran.

Mata pelajaran adalah satu atau sekumpulan bahan kajian dan bahan pelajaran yang memperkenankan konsep, pokok bahasan, tema, dan nilai yang dihimpun dalam satu kesatuan disiplin pengetahuan atau ilmu pengetahuan.¹¹⁾

Isi kurikulum memuat mata pelajaran sebagai berikut; 1. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2 Pendidikan Agama, 3. Bahasa Indonesia (termasuk membaca dan menulis); 4. Matematika (termasuk berhitung) 5. Ilmu Pengetahuan Alam (pengantar sains dan teknologi); 6. Ilmu Pengetahuan Sosial (termasuk ilmu bumi sejarah nasional dan sejarah umum); 7. Kerajinan Tangan dan Kesenian (termasuk menggambar); 8. Pendidikan jasmani dan kesehatan, 9. Bahasa Inggris, 10. Mu-

¹¹⁾ A. Hamid Syarif, Pengenalan Kurikulum Sekolah Dan Madrasah, Op.Cit. Hal. 217

tan Lokal.¹²⁾

Muatan lokal merupakan sejumlah mata pelajaran tambahan sebagai kesatuan program pengajaran jenjang-pendidikan tertentu, yang isi sajiannya disesuaikan dengan keadaan lingkungan atau kebutuhan setempat dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan tanpa mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.

Kesepuluh mata pelajaran tersebut berbeda penyajiannya dengan SMP biasa. Bahan belajar yang digunakan di SMP Terbuka yaitu bahan belajar yang disajikan melalui media cetak berupa modul, serta bahan belajar yang disajikan melalui media non cetak.

Bahan belajar utama siswa SMP terbuka adalah modul tercetak yang dirancang dan disusun supaya mudah dipelajari oleh siswa secara mandiri. Setiap modul berisikan satuan pelajaran yang kecil lingkungannya, sehingga mudah dipahami dan mudah diingat oleh siswa.

Setiap modul berisikan berupa kegiatan belajar. Setiap kegiatan belajar mempunyai tujuan instruksional dan jelas dan spesifik, uraian materi yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, atau latihan yang harus dikerjakan oleh siswa dan kunci tugas latihan tersebut.

Setiap modul mempunyai empat komponen, yaitu :

¹²⁾ i b i d

kegiatan siswa, tes akhir modul, kunci tes dan petunjuk guru. Kegiatan siswa inilah yang menyajikan isi pelajaran yang harus dipelajari siswa. Setelah selesai mempelajari isi pelajaran, siswa diminta mengerjakan tes akhir modul. Kunci tes disediakan untuk membantu guru dalam memeriksa pekerjaan tes siswa. Petunjuk guru memberikan petunjuk mengenai tugas guru - dalam membantu siswa mempelajari modul bersangkutan.

Bahan belajar utama yang berupa modul tersebut ditunjang oleh bahan belajar yang disajikan melalui media radio, kaset suara, dan kemungkinan juga media TV atau video. Bahan belajar ini sifatnya menunjang. Dengan mendengarkan atau melihat dari media-media itu siswa diharapkan memahami isi pelajaran yang telah dipelajari dari modul dengan lebih baik.

D. Sistem Belajar Mengajar SLTP Terbuka

Seperti yang telah anda ketahui, kegiatan belajar mengajar di SMP Terbuka berbeda dengan kegiatan tersebut di SMP biasa. Salah satu cirinya ialah bahwa siswa dibuntut untuk mampu belajar sendiri dengan menggunakan bahan belajar yang secara sengaja dirancang untuk belajar secara mandiri. Kegiatan belajar mandiri itu dilakukan siswa saat hadir di tempat kegiatan-belajar yang disebut TKB. Tentu saja belajar mandiri ini dapat dilakukan siswa saat belajar sendiri di rumah. Disamping belajar mandiri siswa dapat siswa juga

memperoleh kesempatan untuk bertatap muka dengan guru mata pelajaran. Pertemuan ini berlangsung secara berkala dan hanya dalam waktu yang terbatas, yaitu saat siswa menghadiri pelajaran secara tatap muka.

Secara Operasional, SMP terbuka dikelola oleh beberapa tenaga pengelola yang terdiri dari:

a. Kepala Sekolah

Kepala SLTP yang menjadi induk SLTP Terbuka bertugas juga sebagai kepala SLTP terbuka.

b. Wakil Kepala Sekolah

Adalah seorang guru senior pada sekolah induk yang diangkat atau ditunjuk oleh kepala sekolah untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian pengelolaan SLTP terbuka.

c. Guru Pembina.

Adalah guru mata pelajaran pada SLTP induk yang berfungsi sebagai penanggungjawab atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SLTP terbuka

d. Guru Pembimbing

Adalah anggota masyarakat yang memiliki penguasaan dan aspirasi yang cukup tinggi di bidang pendidikan, dan bersedia melakukan tugas membimbing kegiatan belajar siswa di TKB.

e. Guru Pembimbing Khusus.

Adalah anggota masyarakat yang memiliki ketrampilan atau latar belakang pengetahuan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.

f. Guru Bimbingan Dan Penyuluhan

Diutamakan tenaga BP pada SMP induk, tetapi dapat juga ditunjuk guru lain di SMP induk yang dipandang mampu.

g. Tenaga Administrasi

Adakah tenaga administrasi atau tata usaha yang telah bekerja di SMP induk.¹³⁾

Meskipun siswa SLTP terbuka dapat belajar dimana saja dan kapan saja, tetapi secara formal ada dua kegiatan belajar yang wajib dihadiri siswa. Yaitu Kegiatan belajar di TKB dan kegiatan belajar - secara tatap muka. Siswa wajib datang ke TKB selama empat atau lima hari kurang lebih tiga jam sehari. Selama di TKB siswa belajar mandiri dengan menggunakan modul. Bila siswa menjumpai hal-hal se kiranya sulit dipahami sendiri dapat ditanyakan pada temannya atau ditanyakan kepada guru pembimbing yang bertugas. Apabila masih juga tidak bisa terpecahkan dapat disampaikan pada guru bina saat pelajaran tatap muka.

¹³⁾ Pengenalan SMP Terbuka, Op.Cit., Hal. 11-12.

Program Belajar Di TKB

Belajar di TKB merupakan kegiatan belajar mandiri atau kelompok, dengan ~~sekel~~ sebagai bahan belajar utama.

Jumlah hari belajar di TKB adalah empat hari dalam seminggu. Setiap hari belajar selama 4 jam mata pelajaran perjam mata pelajaran 45 menit diselingi istirahat selama 15 menit. Jadi dalam satu minggu terdapat enam belas jam pelajaran. Dalam satu cawu terdapat 12 atau 10 minggu efektif..Waktu sebanyak ini dipakai untuk belajar di TKB dan tatap muka disekolah induk. Bila dalam satu cawu terdapat 10 minggu efektif belajar di TKB maka jumlah jam seluruhnya adalah 160 jam. Alokasi waktu sebanyak ini dibagi untuk sepuluh mata pelajaran. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap mata pelajaran mendapat porsi yang berbeda sesuai dengan tingkatan kepentingan dan kesulitan mata pelajaran tersebut. Seperti matematika dan Bahasa Inggris atau mata pelajaran lainnya diberi waktu yang lebih banyak. 14)

Secara rinci cara belajar di TKB adalah sebagai berikut:

1. Waktu belajar disepakati antara guru pamong dengan siswa.
2. Belajar mandiri atau kelompok dengan menggunakan me

14.) Depdikbud, Panduan Pengelolaan SLTP Terbuka Bagian kedua. Petunjuk Praktis Bagi Guru Bina, Depdikbud, Jakarta, 1996, Hal.13

16
dul dibawah bimbingan guru pamong.

3. Peranan guru Pamong

- a. membaca buku petunjuk bagi guru pamong untuk mengetahui hal-hal yang harus dilakukan
- b. membagikan modul kepada siswa yaitu kegiatan siswa
- c. mempelajari modul agar mengetahui tentang tujuan dan petunjuk lain.
- d. menjelaskan kepada siswa cara belajar dengan modul, radio atau kaset
- e. meminta kepada siswa untuk mengisi daftar hadir
- f. mencatat kemajuan siswa untuk mengetahui kapan harus dilakukan tes akhir modul/ulangan harian atau tes yang lain
- g. mencatat pertanyaan dan masalah yang tidak bisa dipecahkan di TKB dan dikirim ke guru bina
- h. membimbing belajar siswa di TKB
- i. menyampaikan laporan bulanan kegiatan belajar di tkb ke SLTP induk
- j. membantu melakukan tes akhir modul bila diminta guru bina. ¹⁵⁾

Selain belajar di TKB, siswa juga wajib mengikuti belajar secara tatap muka yang diselenggarakan kurang lebih enam jam dalam seminggu. Pelajaran tatap mu-

¹⁵⁾ Depdikbud, Panduan Pengelolaan SLTP Terbuka Bagian Pertama, Petunjuk Operasional, Jakarta, 1996, Hal.29

muka ini merupakan pertemuan tatap muka antara siswa - dengan guru pembina mereka di SMP induk.

Program Belajar Tatap Muka

Program tatap muka adalah bagian program catur wulan. Bentuknya berupa matriks kegiatan di sekolah induk atau ditempat lain, setiap minggu selama satu catur wulan. ¹⁶⁾

Kegiatan tatap muka sebaiknya dilaksanakan di SLTP induk. Hal ini dapat memberi beberapa keuntungan, yaitu selain siswa dapat bertemu guru bina untuk memecahkan kesulitan belajarnya juga dapat memanfaatkan fasilitas belajar yang ada di SLTP induk seperti laboratorium, perpustakaan dan lainnya. Disamping itu juga akan memberikan dampak positif bagi siswa bahwa siswa SLTP terbuka juga adalah siswa SLTP induknya.

Namun bila tatap muka sulit dilaksanakan di SLTP induk karena masalah transportasi dan biaya maka dapat dilaksanakan di tempat lain atau di salah satu TKB. Siswa-siswa dari beberapa TKB yang berdekatan dapat mengikuti tatap muka di tempat yang disepakati tersebut. Guru bina dari SLTP induk datang ke TKB sesuai jadwal.

Adapun cara belajar tatap muka adalah sebagai berikut:

1. Jadwal disusun bersama guru bina dengan kepala sekolah.

¹⁶⁾ Depdikbud, Op.Cit., Hal. 10

2. Pendekatan kegiatan belajar adalah CBSA
3. Urutan kegiatan yang harus dilakukan guru bina antara lain:
 - a. Identifikasi masalah kesulitan belajar siswa dari TKB
 - b. meneliti tes akhir modul atau membaca modul untuk menemukan kesulitan yang pada umumnya dialami siswa
 - c. menganalisis kesesuaian antara modul dan buku paket
 - d. mencatat pertanyaan langsung dari siswa atau laporan dari guru pamong
 - e. penentuan tujuan tatap muka setelah meneliti butir a), b), dan c)
 - f. menentukan materi utama
 - g. melaksanakan kegiatan tatap muka
 - h. melakukan penilaian. ¹⁷⁾

Adapun tatap muka untuk tiap kelas adalah 6 jam pelajaran per hari per minggu. Jumlah mata pelajaran ada 10 mata pelajaran, dengan catatan IPA terdiri dari Biologi dan Fisika, dan IPS terdiri dari Geografi, Sejarah dan Ekonomi, muatan lokal dua atau tiga mata pelajaran. Dengan pola 5/2 (4 hari belajar di TKB, 2 hari tatap muka di SLTP induk), maka selama satu catur

¹⁷⁾ Pengelolaan SLTP Terbuka Bagian Pertama, Op.Cit hal. 33

wulan, jumlah pelajaran tatap muka adalah:

Cawu 1 atau Cawu 2 = $12 \times 2 \times 6 = 144$ jam pelajaran

Cawu 3 = $10 \times 2 \times 6 = 120$ jam pelajaran

Khusus cawu 3 kelas III = $8 \times 2 \times 6 = 96$ jam pelajaran.¹⁸⁾

Bagaimana pun model kegiatan belajar mengajar - dalam satu lembaga pendidikan, tetapi kesemuanya pasti mengarah pada tercapainya arti dari pendidikan itu sendiri. Yaitu aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan memelihara potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani) dan jasmani (panca indera serta ketrampilan). Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita atau tujuan pendidikan, isi sistem dan organisasi pendidikan. Pendidikan merupakan pila hasil atau prestasi yang dicapai oleh perkembangan manusia dan usaha-usaha lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya.¹⁹⁾

4. Evaluasi SLTP Terbuka.

Program penilaian pada SLTP Terbuka meliputi:

1. Tes Akhir Modul

Yaitu tes yang diberikan kepada setiap siswa bila telah selesai mempelajari satu modul. Gunanya untuk mengetahui kemampuan siswa memahami isi modul. Banyaknya tes akhir modul tergantung pada jumlah me-

¹⁸⁾ Tim Dosen FIP-IKIP Malang, Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan, Usaha Nasional, Surabaya, 1988, Hal.7-8

dul dalam satu cawu. Misalnya untuk mata pelajaran Geografi kelas II cawu 1 ada 4 modul, maka siswa akan mendapatkan 4 kali tes akhir modul. Dalam pelaksanaannya, tes akhir modul tidak diberikan secara individual, tetapi dilaksanakan secara bersama-sama di TKB atau di sekolah induk. Tes akhir modul berfungsi sebagai ulangan harian.

2. Tes Akhir Unit

Modul-modul yang masih dalam satu bahasan dapat dikelompokkan menjadi unit. Setiap unit terdiri atas dua modul atau lebih. Apabila siswa telah selesai mempelajari satu unit diberikan tes akhir unit. Tes akhir unit juga berfungsi sebagai ulangan harian. frekuensi tes akhir unit juga bergantung kepada banyaknya unit dalam satu cawu. Soal tes akhir unit disusun oleh guru bina.

3. Tes Akhir Catur Wulan

Pada akhir cawu siswa diberikan tes akhir cawu yg bahannya mencakup seluruh isi modul yang dipelajari selama satu cawu. Bahan tes akhir akhir cawu ini bersifat kumulatif, artinya tes akhir cawu pertama bahannya diambil dari materi modul cawu pertama. Untuk tes akhir cawu kedua bahannya mencakup materi modul cawu pertama dan kedua. Tes akhir cawu ketiga diambil dari cawu 1,2 dan 3. Dan disusun

oleh guru bina.²⁰⁾

Evaluasi belajar untuk siswa SLTP terbuka dilakukan melalui:

1. Pengerjaan tugas yang merupakan suatu kesatuan dengan modul kegiatan siswa.
Kegiatan ini dilakukan siswa dan diperiksa sendiri-oleh siswa dengan menggunakan kunci yang tersedia . Bila dari hasil dari pengerjaan tugas cukup baik, yang bersangkutan baru dapat mengikuti tes akhir modul. Tugas-tugas ini tidak menentukan nilai rapor.
2. Tes akhir modul atau ulangan harian setelah satu modul (M)
 - a. tes akhir modul dilakukan setelah siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas yang tercantum dalam kegiatan siswa dengan baik.
 - b. Sehenaryantes akhir modul menjadi tanggungjawab guru bina, tetapi dapat meminta bantuan pada guru pamong.
 - c. Perangkat tes akhir modul disimpan oleh guru bina dan baru dikeluarkan kalau mau digunakan. Setelah selesai tes, lembar ditarik kembali untuk disimpan (sifatnya rahasia).
 - d. Pemeriksaan tes akhir modul dilakukan oleh guru bina atau bila memungkinkan dapat dibantu juga O

²⁰⁾ Depdikbud, Op.Cit., Hal. 14.

oleh guru pameng. Caranya yaitu menggunakan kunci tes akhir modul yang tersedia. Karena itu tes akhir modul dapat diselenggarakan di TKB dengan bantuan guru pameng.

e. Tes akhir modul merupakan tes/ulangan harian karena itu hasilnya turut menentukan nilai rapor.

f. tes akhir modul telah tersedia dalam perangkat-modul, jadi guru bina tidak usah menyusun lagi.

g. seorang siswa dapat mempelajari modul berikutnya setelah hasil tes akhir modulnya minimal 6,5.

3. Tes beberapa modul/tes akhir unit/ulangan umum tes ini juga termasuk ulangan harian dan dari beberapa modul dalam satu unit. Banyaknya modul dapat ditentukan dengan melihat kode modul.

Dari kode modul tersebut dapat diketahui kumpulan-beberapa modul tiap unit. Hasil tes ini turut menentukan nilai rapor. bila dipandang perlu dapat dilakukan bersama-sama dengan ulangan bagi siswa di SLTP induk.

4. Ulangan Umum (Q)

Ulangan umum adalah penilaian prestasi belajar siswa yang dilakukan pada akhir tahun pelajaran. Penyelenggaraannya dapat bersama-sama di SLTP induk. Seala-

nya disusun oleh guru bina. Hasil ulangan umum ini turut menentukan nilai rapor.

5. Menentukan nilai rapor dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir EBTA dan EBANAS untuk siswa SLTP terbuka sama pada SLTP reguler (termasuk materinya)

Cara menghitung rapor menggunakan rumus:

$$N = \frac{P + 2Q}{3}$$

N = Nilai Rapor

P = Rata-rata Nilai Ulangan Harian (nilai tes akhir modul dan nilai tes beberapa modul/unit)

Q = Nilai ulangan umum

Pada SLTP terbuka rata-rata nilai ulangan harian (M) diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{M + 2U}{3}$$

M = rata-rata nilai tes akhir modul

U = rata-rata nilai tes akhir unit

Adapun kriteria kenaikan kelas adalah:

1. Kenaikan kelas dipertimbangkan berdasarkan nilai rapor pada Cawu 3
2. Kriteria nilai adalah:
 - a. tidak boleh ada nilai 3 atau kurang dari 3
 - b. nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran - termasuk muatan lokal sekurang-kurangnya 6,0.

3. Hanya boleh ada 5 (lima) nilai kurang (5k) dengan ketentuan:
 - a. angka 4 dihitung 2 nilai kurang (2k)
 - b. angka 5 dihitung 1 nilai kurang (1k)
4. Nilai mata pelajaran Pendidikan Agama, PPKN dan Bahasa Indonesia masing-masing tidak boleh kurang dari 6.²¹⁾

B. Program Wajib Belajar.

Program wajib belajar 9 tahun, sebagai salah satu dimensi pengembangan sistem pendidikan Nasional merupakan salah satu bidang yang sangat vital dan penting bagi keseluruhan pembangunan bangsa dan negara. Hal ini sangat bisa dipahami karena pendidikan merupakan salah satu sektor penentu pembangunan nasional, baik dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, mempercepat proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi (IP-TEK) dalam rangka akselerasi kemajuan bangsa dan negara, maupun dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, yakni "masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".

1. Pengertian Wajib Belajar 9 Tahun.

Wajib belajar dapat dimengerti sebagai suatu keharusan yang diberikan kepada setiap anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan pada suatu jenjang ter

²⁰⁾ Panduan Pengelolaan SLTP Terbuka Bagian Pertama, Op.Cit. Hal. 34-36

49

tentu sampai tamat. Dari pengertian tersebut maka wajib belajar membawa konsekuensi kepada orang tua untuk berkewajiban mengirimkan anak-anaknya mengikuti pendidikan. Disamping itu orang tua juga mempunyai hak juga untuk memperoleh tempat pendidikan bagi anak-anaknya.²²⁾

Dilain pihak, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan guna kelancaran program wajib belajar tersebut disamping pemerintah juga mempunyai hak untuk menuntut kepada orang tua untuk mengirimkan anak-anaknya mengikuti pendidikan. Sebagaimana dalam buku serapan BP 7 Jawa Timur, bahwa hubungan negara dengan warga negara penduduk/masyarakat, ada hak warga negara mendapatkan pengajaran. Pada pasal 31 ayat (1), tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pemerintah menguakahkan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang pasal 31 ayat (2).²³⁾

Dalam UU RI Nomer. 2 tahun 1959 tentang pendidikan nasional pasal 6 menyebutkan bahwa: "setiap war

²²⁾ H.A. Said Hidayat, Studi Tentang Wajib Belajar Disajikan pada seminar sehari PMII rayen Tarbiyah IAIN Su pel, 10 Mei 1994, Surabaya, Hal. 10

²³⁾ BP.7 Propinsi Jatim, Buku Serapan Penataran, Surabaya, 1988, Cet. III, Hal. 35

ga negara berhak atas kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan tamatan pendidikan dasar".²⁴⁾

Masalah Wajar 9 tahun ini, ketika mula-mula di lansir, telah banyak menimbulkan kesalahpahaman, baik dikalangan masyarakat umum maupun dikalangan pendidik. Ada yang mengira dengan wajar 9 tahun ini, ditambah berita di media masa bahwa pendidikan dasar Indonesia adalah 9 tahun, maka SLTP akan dihapuskan dan diganti dengan SD 9 tahun (bukan 6 tahun seperti sekarang). A. Anggapan ini jelas keliru karena penjelasan ayat (1) pasal 13 UUSPN dengan jelas berbunyi: "Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya 9 tahun yang diselenggarakan selama 6 tahun di sekolah dasar (SD) dan 3 tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau satuan yang sederajat."

Oleh sebab itu rencana pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu wujud usaha pemerintah untuk mengimplementasikan amanat UU No. 2 tahun 1989, dimana sebagai konsekwensinya kepada seluruh warga negara diwajibkan sekurang-kurangnya men

²⁴⁾ H.A. Said Hidayat, Op.Cit. Hal. 11

memperoleh pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

Akan tetapi wajib belajar di Indonesia tidak identik dengan wajib belajar yang dianut oleh negara maju. Wajib belajar di negara maju dimaknai sebagai "compulsary education", sedangkan wajib belajar di Indonesia merupakan "universal primary education".

Berdasarkan undang-undang No. 2 tahun 1989 (pasal 3 dan pasal 13) dan PP. No. 28 tahun 1990 (pasal 3 dan pasal 3) esensi dan ciri-ciri pendidikan dasar 9 tahun adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Pertama, pendidikan dasar merupakan pendidikan umum yang merupakan pendidikan minimum serta mengutamakan perluasan serta pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan penghususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir pendidikan.

Kedua, pendidikan dasar berlangsung 9 tahun yaitu 6 tahun di sekolah dasar (SD) dan 3 tahun di SLTP atau yang sederajat.

Ketiga, pendidikan dasar tidak bersifat uniform secara nasional. Artinya meskipun pendidikan dasar merupakan pendidikan minimum, tidak berarti semua peserta didik mendapatkan materi kurikulum yang sama seluruhnya melainkan dimungkinkan adanya perbedaan diluar materi muatan nasional.

Keempat, pendidikan dasar diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur luar pendidikan sekolah pada berbagai jenis dan bentuk satuan pendidikan.

Kelima, lulusan pendidikan dasar, baik jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, adalah setara dan peserta didik memiliki keleluasaan gerak yang sama untuk memanfaatkan semua rumpun dan wahana yang ada.

Keenam, pendidikan dasar memiliki tujuan pokok yaitu menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat dan membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna untuk kehidupannya untuk hidup di masyarakat.²⁵⁾

2. Latar Belakang Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun

Program wajib belajar adalah upaya dalam rangka pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat serta bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh; yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan perkataan lain, pendidikan nasional, berfungsi seba

²⁴⁾ Suwarso, Suyoto, Penyuksesan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Rumusan hasil diskusi panel Nasional, Universitas Merdeka Malang, Tanggal 15-16 November 1993, Hal. 6.

gali alat utama untuk menegembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa.

Dalam kaitannya dengan pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, pemerintah mencanangkan perluasan program WAJAR sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan - Tingkat Pertama (SLTP) yang selanjutnya dikenal dengan program wajib belajar 9 tahun.

Dengan demikian jelaslah sudah bahwa ikhtiar peningkatan mutu sumber daya manusia tidak mungkin lepas dari pendidikan . Dengan pendidikan kita dapat mengubah hal yang negatif menjadi hal yang positif. Potensi yang besar dapat diwujudkan sebagai kekuatan raksasa melalui pelatihan dalam pendidikan.²⁶

Dapat ditarik kesimpulan dari berbagai pemikiran diatas, bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi - program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah sebagai berikut:

Pertama, lebih dari 80% angkatan kerja Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar atau lebih rendah, yaitu mereka yang tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah.

²⁵⁾ MPA, Perencanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, No. 92/Dul Qaidah 1414 H/Mei 1994 M/TH VIII, Hal. 8.

Kedua, dari sudut pandang ekonomi, Pendidikan dasar 9 tahun merupakan peningkatan kualitas SDM yang dapat memberi nilai tambah lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi,. Dengan rata-rata pendidikan dasar-9 tahun bagi masyarakat, dimungkinkan bagi mereka dapat memperluas wawasannya dalam menciptakan kegiatan-ekonomi secara beraneka ragam (diversified).

Ketiga, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk lebih mampu berperan serta sebagai pelaku-pelaku ekonomi dalam sektor-sektor ekonomi nonmeratifikasi atau industri.

Keempat, dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9-tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan.

Kelima, dengan semakin luasnya kesempatan belajar 9 tahun, maka usia minimal angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Peningkatan tersebut disamping akan meningkatkan produktivitas rata-rata perkapita angkatan kerja Indonesia, juga menghindari kesewenang-wenangan mempekerjakan anak dibawah usia seperti terjadi di negara-negara berkembang lain, misalnya India dan negara di Amerika Latin.²⁷⁾

²⁷⁾ Wardiman Djeyenegoro, Kebijaksanaan Operasional Wajib Belajar 9 Tahun, Prisma, No.5 1994

Dengan ini dapat disimpulkan kehadiran program wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat Indonesia alternatif masa depan dengan harapan cerah.

Secara yuridis formalsebagai landasan hukum pe-
pencanangan wajib belajar 2 Mei 1994 sebagai berikut:

1. Landasan Ideal: Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Landasan konstitusional: UUD1945
 - a. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4
 - b. Pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 31 ayat 1 dan 2
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional pasal 14 ayat (1) dan (2) :
 - (1). Warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar
 - (2). Warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasarnya atau pendidikan yang setara atau sampai tamat.
 - b. Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Hakuan Negara (GBHN) telah menggariskan arah dan kebijaksanaan pembangunan disektor pendidikan.²⁸⁾

²⁸⁾ Depdikbud, Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Petunjuk Pelaksanaan Penuntasan Anak Kurang Beruntung usia 7-12 Tahun Di Masyarakat Nomadik dan Perahu. Dalam Rangka Wajib Belajar Pendidikan Dasar, 1993/1994, Hal.5-6

c. Didalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990-
Bab I pasal 1 ayat (1), Bab I pasal 2 dan Bab 2
Pasal 3.²⁹⁾

3. Arah Dan Tujuan Wajib Belajar 9 Tahun

Pada hakekatnya program wajib belajar merupakan upaya pemerintah yang secara sistemis- sistematis menginginkan terjadinya peningkatan kualitas manusia Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan pembangunan nasional secara adaptif dalam penyerapan informasi IPTEK. Selain itu program wajib- belajar juga merupakan salah satu pengembangan skenario pendidikan yang dijangkaukan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi setiap warga- negara.²⁹⁾

Ditinjau dari dimensi pembangunan nasional arah program wajib belajar adalah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang secara makro juga akan mencakup aspek sosial dan ekonomi, namun dimensi utama dan kuncinya adalah pendidikan.

Sebagai salah satu negara menjelang era industrialisasi, Indonesia tidak mempunyai pilihan lain kecuali melaksanakan perluasan dan pemerataan pendidikan. Kebijakanaksanaan pendidikan sejak pelita I-V diarah-

²⁹⁾ Wahjetomo, Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Problematika Dan Alternatif Solusinya, Gramedia, Jakarta, 1994, Hal. 1

kan pada lebih terciptanya pemerataan dan keadilan untuk memperoleh pendidikan, khususnya pada tingkat pendidikan dasar, yang semula enam tahun menjadi 9 tahun.

Wajib belajar di Indonesia mengadopsi konsep pendidikan semesta atau "universal basic education". Yaitu wawasan untuk membuka kesempatan secara luas bagi semua peserta didik untuk memperoleh kesempatan pendidikan dasar. Jadi sasaran utamanya adalah menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua dan peserta didik yang telah cukup umur mengikuti pendidikan, untuk meningkatkan produktivitas kerja secara makro.

UU No. 2 tahun 1989 memandangi pembangunan nasional di bidang pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang maju, adil dan makmur serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniyah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³⁰⁾

Pasal 3 UU No. 2 1989 menerjemahkan pemahaman tersebut dalam perumusan tentang fungsi pendidikan nasional dalam kalimat " pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional."

Dengan ini program wajib belajar dapat menumbuh

kan iklim yang bisa memberi kuasa (empower) kepada semua anggota masyarakat. Pemberdayaan ini bisa diartikan sebagai peningkatan kemampuan seseorang menentukan keinginan dan memenuhi aspirasinya sendiri tanpa menyerahkan begitu saja karena tekanan atau paksaan orang, struktur, lembaga atau pihak-pihak lain.
